

**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH**  
**DINAS PERTANIAN**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**(LKjIP)**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Labungkari, Januari 2022

## KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah Tahun 2021 merupakan wujud pertanggungjawaban manajerial Pimpinan Satuan Kerja yang disarankan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah. Dengan demikian sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten Buton Tengah yang mengemban tugas di bidang urusan Pilihan Pertanian Substansi LKjIP ini sebenarnya mengacu pada RENSTRA Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah. Oleh karena itu keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah merupakan kontribusi yang sangat berarti bagi keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah dalam pembangunan Urusan Pilihan Pertanian. Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang terlibat dalam pembinaan dan pengembangan sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan hortikultura, dengan harapan hasil kerja tersebut akan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Buton Tengah.

Kami sadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan LKjIP ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran bagi perbaikan sangat kami harapkan. Semoga LKjIP Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah Tahun 2021 memberikan sumbangan yang berarti bagi Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dalam pelaksanaan dan rencana tindak perbaikan kinerja di masa mendatang.

Labungkari, 24 Januari 2022

KEPALA DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN BUTON TENGAH



**RAZUDDIN, S.P**  
Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19671231 200604 1 129

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum .....	1
1.3. Tugas dan Fungsi .....	2
1.4. Isu Strategis .....	3
1.5. Struktur Organisasi .....	5
1.6. Sarana dan Prasarana .....	9
1.7. Keuangan .....	10
1.8. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	11
2.1. Perencanaan Strategis .....	11
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 .....	16
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....	17
2.4. Program dan Kegiatan .....	18
2.5. Indikator Keberhasilan .....	22
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	24
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021 .....	24
3.2. Realisasi Anggaran .....	35
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	46
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk menjadi jembatan penghubung sebagai media informasi pertanggungjawaban Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah dalam memberikan gambaran untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Demikian pula dalam laporan akuntabilitas ini akan diuraikan hasil evaluasi tentang analisis-analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, visi dan misi sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah.

Mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menginstruksikan bahwa setiap instansi untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur sejauh mana pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada pada Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah diwajibkan untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan informasi kinerja secara tertulis dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2021.

### **1.2. Dasar Hukum**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020 mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah;
10. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 55 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah.

### **1.3. Tugas dan Fungsi**

Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah merupakan perangkat daerah Kabupaten Buton Tengah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian diwadahi dalam bentuk dinas. Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
2. Penyusunan program penyuluhan pertanianl
3. Pengembangan prasarana pertanian;
4. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
5. Pengawasan penggunaan sarana pertanianl
6. Pembinaan produksi di bidang pertanian;

7. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
8. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
9. Pembinaan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
10. Pelaksanaan penyuluhan pertanian;
11. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
12. Pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
13. Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanian dipimpin oleh Kepala Dinas dibantu oleh 6 (enam) orang pejabat struktural eselon III dan 17 (tujuh belas) orang pejabat struktural eselon IV serta kelompok jabatan fungsional sebanyak 13 (tiga belas) orang dan staf sebanyak 40 (empat puluh) orang.

#### **1.4. Isu-isu Strategis**

Secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya kesadaran petani dalam pemanfaatan pupuk untuk lahan usahatani
2. Masih tingginya serangan hama penyakit dan gangguan usaha komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
3. Terbatasnya penerapan alat dan mesin pertanian serta rendahnya pemanfaatan teknologi pertanian
4. Tingkat kemampuan manajerial kelembagaan masyarakat masih rendah khususnya untuk kelompok tani, terlihat dari masih banyaknya kelompok tani pemula dibandingkan dengan kelas-kelas kelompok tani lainnya
5. Rendahnya pengetahuan petani tentang pola budidaya tanaman perkebunan secara intensif
6. Kurangnya infrastruktur serta sarana dan prasarana pertanian
7. Pemeliharaan hewan ternak masih menggunakan sistem tradisional khususnya sapi dan kambing masih dibiarkan berkeliaran bebas
8. Usaha peternakan masih didominasi oleh para peternak kecil dan merupakan mata pencaharian salah satu dari sub sistem pertanian, di mana karakteristiknya adalah mempunyai lahan sempit, bermodal kecil dan

produktivitas rendah

9. Belum adanya dokter hewan serta kurangnya petugas Inseminator buatan
10. Belum optimalnya pengembangan pakan ternak
11. Belum adanya lahan percontohan tingkat desa yang merupakan kawasan pengembangan komoditi pertanian khususnya tanaman hortikultura
12. Kurangnya jumlah penyuluh pertanian lapangan di tingkat desa
13. Keterbatasan dan rendahnya kualitas data

Tabel 1.5

Tantangan dan Peluang serta Permasalahan yang dihadapi  
Dinas Pertanian Kab. Buton Tengah Per 31 Desember Tahun 2021

Permasalahan Pelayanan OPD Kabupaten	Faktor	
	Tantangan	Peluang
1	2	3
- Rendahnya kesadaran petani dalam pemanfaatan pupuk untuk lahan usahatannya	- Rendahnya SDM petani dalam pemanfaatan pupuk	- Tersedianya Kuota pupuk bersubsidi
- Masih tingginya serangan hama penyakit dan gangguan usaha komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	- Tingkat pengetahuan petani tentang pengendalian hama dan penyakit tanaman yang masih rendah	- Adanya kemauan petani dalam penerapan teknologi pengendalian hama dan penyakit dalam berusaha tani
- Terbatasnya penerapan alat dan mesin pertanian serta rendahnya pemanfaatan teknologi pertanian	- Tingkat pengetahuan petani tentang penggunaan alsintan yang masih rendah	- Tersedianya alsintan pasca panen
	- Terbatasnya sarana bidang peternakan seperti kandang jepit dalam menunjang pelayanan kesehatan hewan ternak	- Besarnya jumlah populasi ternak
- Rendahnya pengetahuan petani tentang pola budidaya tanaman secara intensif	- Usia tanaman jambu mete yang sudah tidak produktif	- Adanya anggaran optimasi jambu mete
- Belum optimalnya infrastruktur pertanian	- Kebutuhan sumber-sumber air yang sangat tinggi	- Tersedianya dana pembangunan sumber air melalui DAK Penugasan Bidang Pertanian
	- Masih terbatasnya jaringan irigasi, utamanya bendungan bagi pengembangan padi sawah	- Potensi lahan sawah tersedia serta tersedianya sumber air berupa mata air/sungai - Sudah ada percetakan sawah - Telah adanya respon petani dalam budidaya padi sawah
- Belum efektifnya kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian	- Kebutuhan lahan non pertanian yang semakin tinggi	- UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan

Permasalahan Pelayanan OPD Kabupaten	Faktor	
	Tantangan	Peluang
1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mayoritas lahan usaha tani yang dikelola petani masih merupakan tanah adat, bukan lahan milik pribadi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam RTRW Kabupaten Buton Tengah terdapat Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Usaha peternakan masih didominasi oleh para peternak kecil dan merupakan mata pencaharian salah satu dari sub sistem pertanian, di mana karakteristiknya adalah mempunyai lahan sempit, bermodal kecil dan produktivitas rendah</li> <li>- Kurangnya petugas Inseminator buatan (IB)</li> <li>- Kurangnya betina produktif (sapi)</li> <li>- Belum optimalnya pengembangan pakan ternak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya pengetahuan Petani tentang pengelolaan ternak</li> <li>- Belum adanya dana pelatihan tentang teknik budidaya ternak yang baik</li> <li>- Terbatasnya anggaran Bintek IB</li> <li>- Kurangnya ketersediaan pakan ternak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya lahan BPP tingkat kecamatan sebagai lahan percontohan</li> <li>- Adanya program SIWAB/Inseminasi Buatan Kementan RI</li> <li>- Program SIKOMANDAN Kementan RI</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat kemampuan manajerial kelembagaan masyarakat masih rendah khususnya untuk kelompok tani, terlihat dari masih banyaknya kelompok tani pemula dibandingkan dengan kelas-kelas kelompok tani lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah tenaga fungsional yang masih sangat rendah dari target ideal yang ditetapkan pemerintah pusat (1 Desa 1 Penyuluh)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya Balai Penyuluhan Pertanian Tingkat Kecamatan</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum adanya lahan percontohan tingkat desa yang merupakan kawasan perkembangan komoditi pertanian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum tersedianya dana keg percontohan baik dari APBD, APBN dan Dana Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya respon petani untuk mengembangkan komoditi pertanian</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum adanya kaji tindak untuk mendapatkan anjuran teknologi spesifikasi lokasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya anggaran untuk kegiatan kaji terap di BPP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sudah ada rekomendasi tingkat nasional untuk bahan kajian mendapatkan rekomendasi teknologi spesifik lokasi di BPP tiap Kecamatan</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurang maksimalnya kegiatan penyuluhan tingkat desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum terbentuk Pos Penyuluhan Desa (POSLUHDES) di setiap desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sudah ada kelembagaan KTNA Desa dan Penyuluh swadaya tingkat desa</li> </ul>

### 1.5. Struktur Organisasi

Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah mempunyai pegawai sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 32 (tiga puluh dua) orang Pegawai kontrak, dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 1.1  
Jabatan Struktural  
Dinas Pertanian Kab. Buton Tengah Per 31 Desember Tahun 2021

No.	Jabatan		Jumlah
1	Struktural	a. Kepala Dinas (Eselon II.a) b. Sekretaris (Eselon III.a) c. Kepala Bidang (Eselon III.b) d. Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi (Eselon IV.a)	1 orang 1 orang 5 orang 1 orang
2	Fungsional tertentu	a. Penyuluh Pertanian b. Perencana c. Pengawas Mutu Hasil Pertanian	12 orang 1 orang 1 orang
3	Fungsional Umum	Staf	6 orang
4	Pegawai Non PNS		36 orang
	Jumlah		64 Orang

Sumber : Sekretariat Dinas Pertanian per Desember 2021

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah didukung Sumber Daya Aparatur sesuai dengan kompetensi dan tuntutan tugas yang diperlukan. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut kami sajikan kondisi Sumber Daya Aparatur di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah sampai dengan akhir Desember 2021 sebagai berikut :

Tabel 1.2  
Kondisi Pegawai Berdasarkan Golongan  
Dinas Pertanian Kab. Buton Tengah Per 31 Desember Tahun 2021

No.	Tingkat Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	8 orang
2	Golongan III	17 orang
3	Golongan II	3 orang
5	Pegawai Non PNS	36 orang
	Jumlah	64 Orang

Sumber : Sekretariat Dinas Pertanian per Desember 2021

Berdasarkan tabel 1.2 tersebut, personil Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah dengan golongan IV sebanyak 8 orang (12,50%), golongan III sebanyak 17 orang (26,56%), golongan II sebanyak 3 orang (4,69%), dan golongan I sebanyak 0 orang (0,00%) serta Non PNS sebanyak 36 orang (56,25%).

Tabel 1.3  
Kondisi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan  
Dinas Pertanian Kab. Buton Tengah Per 31 Desember Tahun 2021

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S2	1 orang
2	S1	23 orang
3	D4	0 orang
4	D3	0 orang
5	SLTA	4 orang
6	SLTP	0 orang
7	SD	0 orang
	Jumlah	28 Orang

Sumber : Sekretariat Dinas Pertanian per Desember 2021

Berdasarkan tabel 1.3 di atas, tingkat pendidikan personil Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 1 orang (3,57%), tingkat pendidikan S1 sebanyak 23 orang (82,14%), tingkat pendidikan SLTA sebanyak 4 orang (14,29%).

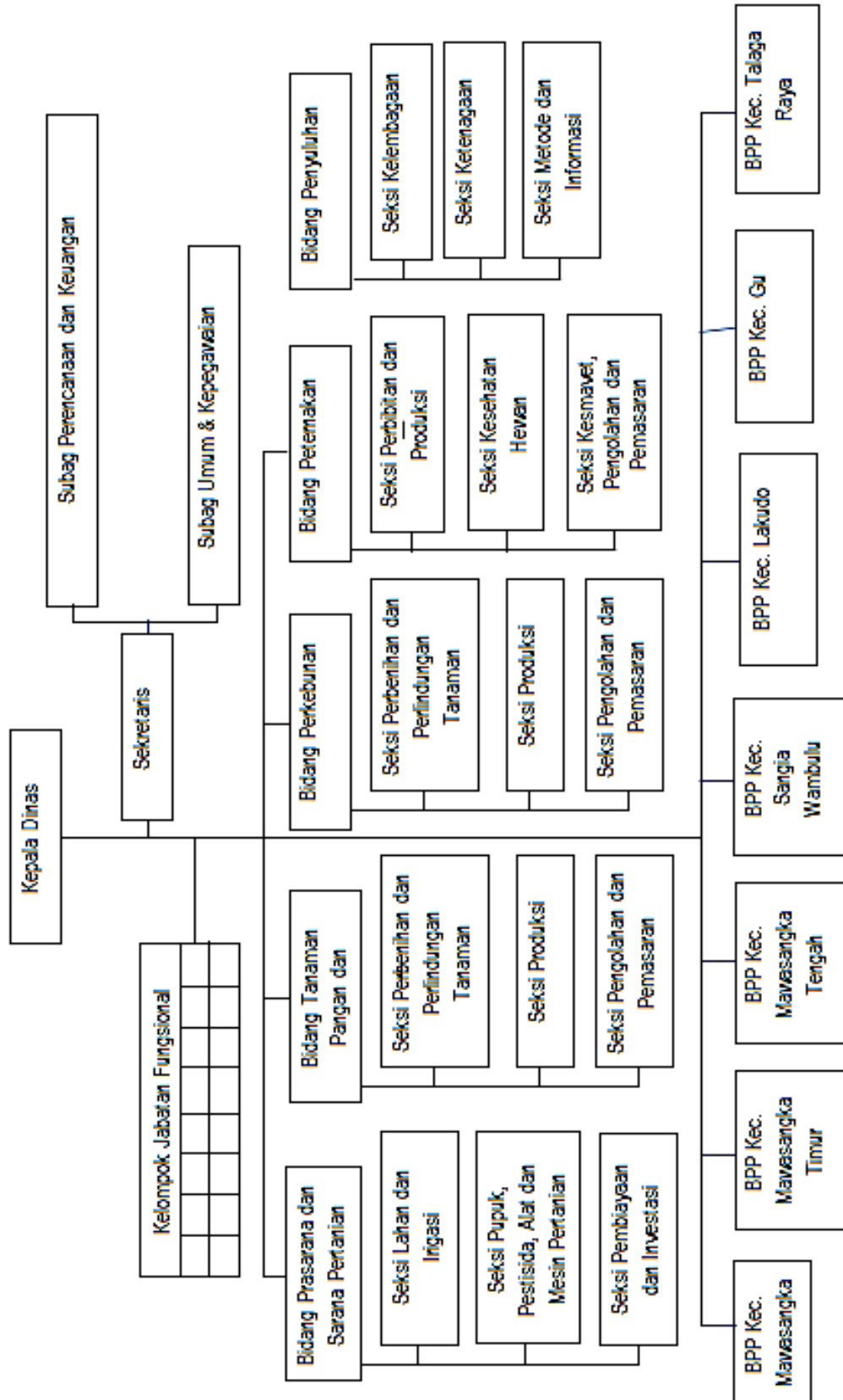
Tabel 1.4  
Komposisi Pegawai Secara Keseluruhan  
Dinas Pertanian Kab. Buton Tengah Per 31 Desember Tahun 2021

No.	Unit Kerja	PNS	THL	JUMLAH
1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretariat	8	10	18
3	Bidang Penyuluhan	14	17	31
4	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	1	2	3
5	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	1	3	4
6	Bidang Perkebunan	2	2	4
7	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	1	2	3
	Jumlah	28	36	64

Sumber : Sekretariat Dinas Pertanian per Desember 2021

Berdasarkan tabel 1.4 di atas, jumlah personil Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah secara keseluruhan meliputi Kepala Dinas sebanyak 1 orang (1,56%), sekretariat sebanyak 18 orang (28,13%), Bidang Penyuluhan sebanyak 31 orang (48,44%), Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sebanyak 3 orang (4,69%), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebanyak 4 orang (6,25%), Bidang perkebunan sebanyak 4 orang (6,25%), dan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebanyak 3 orang (4,69%).

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah  
(sesuai Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor : 55 Tahun 2016)



## 1.6. Sarana dan Prasarana

Selain Sumber Daya Aparatur, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah juga didukung dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana kerja yang memadai. Dalam hal ini, berikut kami sajikan kondisi sarana dan prasarana yang ada di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah sebagai berikut :

Tabel 1.5  
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja  
Dinas Pertanian Kab. Buton Tengah Per 31 Desember Tahun 2021

Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Kondisi Barang
01	Tanah	19	Baik
02	Alat-Alat Besar	2	Baik
03	Alat-Alat Angkutan	24	Baik
04	Alat Bengkel dan Alat Ukur	18	Baik
05	Alat Pertanian	48	Baik
05	Alat Pertanian	2	Rusak
06	Alat Kantor dan Rumah Tangga	76	Baik
06	Alat Kantor dan Rumah Tangga	18	Rusak
07	Alat Studio dan Alat Komunikasi	2	Baik
07	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1	Rusak
09	Alat Laboratorium	2	Baik
09	Alat Laboratorium	1	Rusak
11	Bangunan Gedung	11	Baik
11	Bangunan Gedung	1	Rusak
13	Jalan dan Jembatan	27	Baik
14	Bangunan Air/Irigasi	30	Baik
14	Bangunan Air/Irigasi	2	Rusak
15	Instalasi	1	Baik
16	Jaringan	1	Baik
	Jumlah	286	

Sumber : Sekretariat Dinas Pertanian per Desember 2021

Berdasarkan tabel 1.5 di atas, jumlah sarana dan prasarana pendukung kerja Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah secara keseluruhan sebanyak 286 unit yang menjadi asset dinas, baik yang berasal belanja hibah dari pusat dan dan provinsi ke Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah serta belanja hibah dari Dinas ke kelompok tani penerima manfaat. Dari keseluruhan sarana dan prasarana pendukung kerja Dinas, ada 25 unit dalam kondisi rusak berat, sedangkan 261 unit dalam kondisi baik.

## 1.7. Keuangan

Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah pada Tahun Anggaran 2021 mengelola dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejumlah Rp. 8.093.172.862,- yang terdiri dari Belanja Operasi sejumlah Rp. 6.178.025.517,- dan Belanja Modal sejumlah Rp. 1.915.147.345,-.

## 1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan LKjIP Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah terdiri dari 4 (IV) bab, yaitu sebagai berikut :

### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

### **BAB II : Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **BAB III : Akuntabilitas Kinerja**

Terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran.

### **BAB IV : Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Perencanaan Strategis**

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu antara satu sampai lima tahun. Proses ini diharapkan berlangsung secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang kendala dan tantangan yang ada dan mungkin timbul pada masa yang akan datang secara akumulatif. Hasil yang diharapkan dari proses ini adalah sebuah dokumen rancana stratejik atau dokumen perencanaan jangka menengah.

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah Tahun 2017-2022 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapanyang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi.

##### **2.1.1. Visi dan Misi**

Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tengah periode Tahun 2017-2022, yaitu:

**“Mewujudkan pembangunan berbasis pengembangan potensi wilayah  
menuju Kabupaten Buton Tengah yang berkah”**

Untuk memberikan arahan dalam pencapaian visi, maka visi dijabarkan ke dalam fokus kerja yang disebut dengan **“BERKAH”**, yang merupakan akronim dari **Bersih, Sejahtera, Produktif, Agamis dan Harmonis**. Fokus kerja tersebut memberi arahan kepada Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung ketercapaian visi dan misi.

Visi pembangunan Kabupaten Buton Tengah Tahun 2017-2022, ini menjadi arah cita-cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Buton Tengah. Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

*Gambar 2.1*  
*Buton Tengah Berkah*



***Kabupaten Buton Tengah :***

Pembangunan yang berbasis potensi wilayah, ini akan menjadi kunci ketika melaksanakan pembangunan di Buton Tengah, tentunya harus menyadari karakteristik daerah, agar tepat sasaran dalam membangun. Alam telah terhampar baik di laut maupun di daratan, ini menjadi PR yang harus dijawab akan diapakan potensi tersebut. Ke depan ketika membangun tidak akan asal membangun akan tetapi melihat RTRW Buton Tengah agar zonasi yang ada jelas untuk setiap wilayahnya, juga akan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten untuk membantu, sehingga pelibatan kalangan profesional, kalangan kampus akan kita gandeng dalam menata Buton Tengah. tidak boleh menyerah pada alam, akan tetapi dengan teknologi yang ada Insha Allah potensi alam akan dimaksimalkan.

***Bersih :***

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar/*good governance* yakni pemerintahan yang transparan, membuka kran partisipasi masyarakat, dan akuntabel, bebas dari budaya KKN, demokratis, memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas, tidak melakukan pungutan tanpa dasar hukum pungutan serta pemerintahan yang selalu hadir ditengah-tengah masyarakat.

***Sejahtera :***

Kesejahteraan menjadi kata kunci pembangunan yang akan dilakukan. Sejahtera merupakan keadaan terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial dan

spiritual. Dalam visi ini, sejahtera mempunyai makna kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Buton Tengah dapat dipenuhi secara lahir dan bathin. Masyarakat yang sejahtera merupakan wujud dari masyarakat yang adil dan makmur, baik dari sisi material maupun spiritual. Kesejahteraan juga tercermin dalam semua aspek kehidupan, dimana masyarakat memiliki akses yang sama dalam meningkatkan taraf hidupnya, memperoleh pendidikan, kesehatan, dan serta berusaha dalam semua bidang.

***Produktif :***

Produktivitas di Buton Tengah akan digalakan pada segala sektor kegiatan seperti sektor perikanan, sektor kelautan, sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor peternakan, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif serta usaha-usaha lainnya. Ini akan dilakukan dengan memberikan bantuan modal usaha dan modal keterampilan pelaku-pelaku usaha.

***Agamis :***

Ciri khas Buton Tengah sebagai daerah agamis harus dijaga dan dilestarikan dalam segala aspek kehidupan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

***Harmonis :***

Masyarakat yang harmonis menjadi cita-cita kita sehingga keteraturan dan kerukunan perlu ditata dan dipelihara. Keharmonisan juga akan hadir ketika adanya rasa keadilan dan adanya kesamaan hak dalam hukum dan pelayanan kemasyarakatan, keadilan dalam kemanfaatan hasil-hasil pembangunan antar wilayah dan golongan penduduk, serta pemerintahan yang jujur, bersih, efisien dan efektif sebagai gambaran dari *good governance*.

Misi Kabupaten Buton Tengah 2017-2022 diarahkan untuk mewujudkan Kabupaten Buton Tengah yang sejahtera, agamis harmonis dan berbudaya. Usaha-usaha perwujudan visi Kabupaten Buton Tengah dijabarkan dalam misi sebagai berikut:

1. Pengembangan Potensi sumber daya perikanan kelautan, potensi pariwisata dan potensi pertanian sebagai leading sektor pemicu pengembangan sektor – sektor lainnya.
2. Membangun ekonomi kreatif melalui pemanfaatan potensi sumber daya lokal sebagai wujud peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.



3. Membangun dan meningkatkan infrastruktur wilayah sesuai arahan kebijakan perencanaan spasial.
4. Membangun Sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas.
5. Membangun pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
6. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis yang berakhlak dan berkepribadian.
7. Mewujudkan masyarakat yang sadar hukum serta penguatan nilai-nilai kearifan lokal guna mencapai kehidupan yang harmonis.
8. Memelihara daya dukung lingkungan dan sumber daya alam sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.

### 2.1.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk merealisasikan misi ke-1 RPJMD Kabupaten Buton Tengah tahun 2017-2022, yaitu “Pengembangan Potensi sumber daya perikanan kelautan, potensi pariwisata dan potensi pertanian sebagai leading sektor pemicu pengembangan sektor-sektor lainnya”, maka perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan jangka menengah perangkat daerah ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah sesuai dengan yang termuat dalam sasaran ke 1 dan 2 RPJMD Kabupaten Buton Tengah Tahun 2017-2022. Sedangkan sasaran jangka menengah perangkat daerah merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Adapun tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Perbandingan Sasaran strategis kondisi awal dan target akhir

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kondisi Awal (2017)	Target Akhir (2022)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya produktivitas sektor pertanian	Produktivitas sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Ton/ha	59,89	100,08

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kondisi Awal (2017)	Target Akhir (2022)
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya stabilitas ternak	Persentase pertumbuhan populasi dan produksi ternak	%	5,59	10,39
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan OPD	Nilai SAKIP	%		CC (60)

Tabel 2.2  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi RPJMD : Mewujudkan Pembangunan Berbasis Pengembangan Potensi Wilayah menuju Kabupaten Buton Tengah yang Berkah (Bersih, Sejahtera, Produktif, Agamis & Harmonis)				
Misi 1 RPJMD : Pengembangan Potensi Sumber Daya Perikanan Kelautan, Potensi Pariwisata dan Potensi Pertanian sebagai Leading Sektor Pemicu Pengembangan Sektor-Sektor Lainnya				
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan produksi sektor pertanian dan peternakan	❖ Meningkatkan produktivitas sektor pertanian	Produktivitas sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Meningkatnya produksi dan produktivitas sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Peningkatan produksi pertanian dan perkebunan
	❖ Meningkatkan stabilitas ternak	Persentase pertumbuhan populasi produksi ternak	Meningkatnya produksi sub sektor peternakan	Peningkatan produksi ternak

### 2.1.3. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah menetapkan IKU sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kab. Buton Tengah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4
1. Meningkatnya produktivitas sektor pertanian	Produktivitas sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah produktivitas sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan tahun laporan	Dinas Pertanian Kab. Buton Tengah
2. Meningkatnya stabilitas ternak	Persentase pertumbuhan populasi dan produksi ternak	Jumlah populasi dan produksi ternak tahun pelaporan dikurangi jumlah populasi dan produksi ternak sebelumnya di bagi jumlah populasi dan produksi ternak tahun sebelumnya di kali seratus persen	Dinas Pertanian Kab. Buton Tengah
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan OPD	Nilai SAKIP		Dinas Pertanian Kab. Buton Tengah

## 2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2021, target yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4  
Target Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya produktivitas sektor pertanian	Produktivitas sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Ton/ha	93,69
2	Meningkatnya stabilitas ternak	Persentase pertumbuhan populasi dan produksi ternak	%	9,85

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan OPD	Nilai SAKIP	%	B (>60)

### 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah Tahun 2021 memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, berikut indikator kinerja sasaran dan rencana atau target capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah. Disamping itu, dokumen Perjanjian Kinerja juga memuat informasi tentang program dan kegiatan serta anggaran yang tersedia untuk mencapai sasaran di maksud. Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah untuk Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.5  
Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah  
Tahun Anggaran 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Meningkatnya produktivitas sektor pertanian	Produktivitas sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	93,69 ton/ha
2	Meningkatnya stabilitas ternak	Persentase pertumbuhan populasi dan produksi ternak	9,85 %
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan OPD	Nilai SAKIP	B (>60)

Tabel 2.6  
Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Buton  
Tengah Tahun Anggaran 2021 Pergeseran

Program	Anggaran		Ket.
	Sebelum	Sesudah	
1. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.174.072.750	999.587.750	APBD
2. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.815.250.095	2.815.250.095	APBD
3. Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	128.375.732	123.447.573	APBD
4. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	73.400.500	73.400.500	APBD
5. Penyuluhan Pertanian	414.439.150	347.215.250	APBD
6. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.766.461.694	3.734.271.694	APBD
<b>TOTAL</b>	<b>8.371.999.921</b>	<b>8.093.172.862</b>	

#### 2.4. Program dan Kegiatan

Program kerja teknis operasional merupakan alat untuk mencapai tujuan dan mewujudkan tujuan Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah meliputi :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
5. Program Penyuluhan Pertanian
6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Untuk Kegiatan dan Target Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.7  
Kegiatan dan Target Kinerja Tahun 2021 Pergeseran

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>	<b>10,5 %</b>	<b>1.174.072.750</b>	<b>999.587.750</b>
		<b>5,7 %</b>		
1.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	7 Kec	1.174.072.750	999.587.750
	- Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	8 Klpk	1.145.255.000	970.770.000
	- Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	106 Kali	28.817.750	28.817.750
<b>B</b>	<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>100 %</b>	<b>2.815.250.095</b>	<b>2.815.250.095</b>
1.	Pembangunan Prasarana Pertanian	12 Keg	2.815.250.095	2.815.250.095
	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	2 Unit	453.108.000	453.108.000
	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	1 Unit	127.454.000	127.454.000
	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	4 Unit	1.438.158.000	1.438.158.000
	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	5 Unit	796.530.095	796.530.095
<b>C</b>	<b>Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</b>	<b>100 %</b>	<b>73.400.500</b>	<b>73.400.500</b>
1.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	10 %	<b>73.400.500</b>	
	- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	7 Kec	52.131.300	
	- Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan	7 Kec	21.269.200	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
	Perkebunan			
<b>D</b>	<b>Program Penyuluhan Pertanian</b>	<b>85 %</b>	<b>414.439.150</b>	<b>347.215.250</b>
1.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	4 Keg	414.439.150	347.215.250
	- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	4 Kali	57.238.850	49.307.000
	- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1 Kali	143.035.000	143.035.000
	- Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	7 BPP	7.000.000	7.000.000
	- Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota	8 Klpk	207.165.300	147.873.250
<b>E</b>	<b>Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>251.397 Kg</b>	<b>128.375.732</b>	<b>123.447.573</b>
1.	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	3 %	128.375.732	123.447.573
	- Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	7 Kec	128.375.732	123.447.573
<b>F</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>100 %</b>	<b>3.766.461.694</b>	<b>3.734.271.694</b>
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dok	7.499.200	7.499.200
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	1.249.900	1.249.900
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1.250.000	1.250.000
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1.249.750	1.249.750
	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dok	1.249.800	1.249.800
	- Koordinasi dan	1 Dok	1.249.950	1.249.950

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
	Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	1.249.800	1.249.800
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	3.043.526.054	3.011.366.054
	- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	2.977.825.654	2.947.825.654
	- Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan	12 Bulan	57.200.850	55.040.850
	- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Lap	1.249.800	1.249.800
	- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	1 Lap	7.249.750	7.249.750
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Tahun	21.265.200	21.265.200
	- Pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	12 Bulan	1.748.100	1.748.100
	- Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	6 Dok	19.517.100	19.517.100
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Tahun	7.563.250	7.563.250
	- Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 Bulan	7.563.250	7.563.250
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	329.396.150	329.366.150
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	7 Jenis	2.432.500	2.432.500
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	9.777.900	9.777.900
	- Penyediaan peralatan rumah tangga	12 Bulan	2.030.500	2.030.500
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	4.971.250	4.971.250
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 SKH/ Majalah	2.880.000	2.880.000
	- Penyediaan bahan/ material	12 Bulan	10.000.000	10.000.000



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
	- Fasilitasi kunjungan tamu	12 Bulan	3.702.000	3.702.000
	- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	85 Rapat	293.602.000	293.572.000
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	198.617.250	198.617.250
	- Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	4 Unit	130.967.250	130.967.250
	- Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Unit	67.650.000	67.650.000
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	100.644.590	100.644.590
	- Penyediaan jasa surat menyurat	49 Surat	6.000.000	6.000.000
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	21.545.040	21.545.040
	- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	73.099.550	73.099.550
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	57.950.000	57.950.000
	- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	25 Unit	51.540.000	51.540.000
	- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	10 Unit	6.410.000	6.410.000
<b>TOTAL</b>			<b>8.371.999.921</b>	<b>8.093.172.862</b>

## 2.5. Indikator Keberhasilan

Agar diperoleh acuan dalam pengukuran dan penilaian kinerja, maka terhadap rencana strategis tersebut telah ditetapkan indikator dan target kinerja masing-masing sasaran strategis, serta indikator kinerja dan target masing-masing kegiatan.

Berikut ini menjabarkan target indikator kinerja pada setiap sasaran strategis pada tahun 2021 :

Tabel 2.8  
Target Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Capaian
1	Meningkatnya produktivitas sektor pertanian	Produktivitas sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	93,69 ton/ha
2	Meningkatnya stabilitas ternak	Persentase pertumbuhan populasi dan produksi ternak	9,85 %
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan OPD	Nilai SAKIP	B (>60)

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah merupakan bagian dari kewajiban Dinas Pertanian yang mengacu pada Misi ke satu Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah yaitu Pengembangan Potensi Sumber Daya Perikanan Kelautan, Potensi Pariwisata dan Potensi Pertanian sebagai leading sektor pemicu pengembangan sektor-sektor lainnya, dengan sasaran strategis yakni meningkatnya produktivitas potensi unggulan dan perdagangan Kabupaten Buton Tengah dan indikator sasaran yakni kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB. Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Buton tengah Tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

#### **3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021**

Pengukuran capaian kinerja dalam rangka evaluasi kinerja menggunakan beberapa cara, antara lain :

1. Membandingkan rencana dan realisasi;
2. Membandingkan realisasi tahun ini dengan tahun lalu;
3. Membandingkan dengan organisasi lain;
4. Membandingkan realisasi dengan standartnya.

Beberapa tahap pengukuran :

1. Inti dari pengukuran adalah membandingkan antara sesuatu yang diukur dengan alat ukur yang berupa indikator kinerja atau ukuran kinerja;
2. Dalam analisis ini perlu dijelaskan proses dan nuansa pencapaian sasaran dan tujuan secara efesiensi, efektif dan ekonomis sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
3. Perlu pula dilakukan analisis terhadap komponen-komponen penting dalam evaluasi kinerja antara lain mencakup analisis input-output, analisis realisasi outcomes-benefits, analisis impact baik positif maupun negatif dan analisis proses pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut, analisis keuangan dan kebijakan.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala ordinal sebagai berikut :

### Skala Pengukuran Kinerja Dengan Cara Ordinal

No.	TARGET INDIKATOR KINERJA	KATEGORI
1.	85-100	Sangat berhasil
2.	70-84	Berhasil
3.	55-69	Cukup Berhasil
4.	Kurang dari 55	Kurang

adapun pengukuran kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator Kinerja} = \frac{\{ \text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}) \}}{\text{Target}} \times 100\%$$

#### 3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021 adalah untuk mengetahui apakah sasaran strategis Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah pada tahun 2021 telah tercapai dan sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Capaian	Capaian (%)
1	Meningkatnya produktivitas sektor pertanian	Produktivitas sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	93,69 ton/ha	78,33 ton/ha	83,61
2	Meningkatnya stabilitas ternak	Persentase pertumbuhan populasi dan produksi ternak	9,85 %	7,75 %	78,68
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan OPD	Nilai SAKIP B (>60)	>60	CC (60)	98,36

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang terbagi dalam indikator sasaran strategis, pencapaian indikator kinerja untuk tahun 2021 cukup bervariasi, ada yang berhasil namun ada juga yang cukup berhasil.

Pencapaian sasaran strategis pertama, Meningkatnya produktivitas sektor pertanian dengan indikator produktivitas sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dengan capaian kinerja 83,61%. Capaian tersebut diperoleh dari nilai produksi tahun 2021 untuk sub sektor tanaman pangan 12.165 ton (komoditi padi 226 ton, jagung 2.048 ton, kacang tanah 77 ton, ubi kayu 8.165 ton, ubi jalar 1.650 ton), sub sektor perkebunan 3.961 ton (komoditi jambu mete 2.466 ton, kelapa 1.427 ton, kopi 5,62 ton, lada 1,69 ton, kakao 9,26 ton, vanili 5,5 ton), sub sektor hortikultura 9.867 ton (komoditi sayuran 3.032 ton, buah-buahan 4.349 ton dan biofarmaka 2.486 ton) dibagi data luas panen tahun 2021 untuk sub sektor tanaman pangan 2.251 ha (komoditi padi 92 ha, jagung 1.482 ha, kacang tanah 100 ha, ubi kayu 423 ha, ubi jalar 154 ha), sub sektor perkebunan 7.412 ha (komoditi jambu mete 6.350 ha, kelapa 947 ha, kopi 10 ha, lada 9 ha, kakao 22 ha, kemiri 49 ha dan vanili 25 ha), sub sektor hortikultura 1.149 ha (komoditi sayuran 350 ha dan biofarmaka 799 ha) dikalikan seratus persen, sehingga realisasi produktivitas sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan tahun 2021 sebesar 78,33 ton/ha, sedangkan yang ditargetkan sebesar 93,69 ton/ha, sehingga capaian kinerja indikator pertumbuhan produksi sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan adalah 83,61%. Tidak terlalu tingginya capaian nilai produktivitas dikarenakan iklim yang tidak menentu sehingga kebanyakan petani mengalami gagal panen.

Indikator produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dikategorikan berhasil disebabkan program kegiatan pendukung capaian kinerja tersebut meliputi :

- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
  - ✓ Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
    - Sub kegiatan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi (intensifikasi padi sawah dan optimasi tanaman jambu mete)
    - Sub kegiatan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
  - ✓ Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian

- Sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
- Sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung
- Sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- Sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya
- Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
  - ✓ Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
    - Sub kegiatan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
    - Sub kegiatan pencegahan, penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
- Program Penyuluhan Pertanian
  - ✓ Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
    - Sub kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa
    - Sub kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa
    - Sub kegiatan penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian
    - Sub kegiatan pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota

Dari segi anggaran yang berasal dari Dana Alokasi Umum terjadi peningkatan, namun untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) terjadi penurunan pagu anggaran. Selain itu juga adanya peningkatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang berasal dari satker provinsi maupun pusat berupa pengadaan benih padi gogo dan jagung hibrida serta pengadaan sarana dan prasarana pertanian yang dapat menunjang peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan perkebunan masyarakat.

Pencapaian sasaran strategis ketiga, meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan OPD dengan indikator Nilai evaluasi SAKIP tahun 2021 Capaian Kinerja 98,36%. Capaian tersebut diperoleh dari hasil nilai evaluasi SAKIP tahun 2021 CC (60%) di bagi target hasil evaluasi SAKIP tahun 2021 B

(>60%) dikali seratus persen, sehingga yang ditargetkan sebesar >60 %, yang terealisasi 60 % atau mencapai 98,36 % dari target indikator kinerja 100%.

Indikator Nilai Evaluasi SAKIP dikategorikan sangat berhasil disebabkan program kegiatan pendukung capaian kinerja tersebut meliputi :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - ✓ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - ✓ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - ✓ Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - ✓ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - ✓ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - ✓ Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - ✓ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - ✓ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Nilai evaluasi SAKIP dikategorikan sangat berhasil namun belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan dikarenakan pemaparan hasil kinerja oleh Kepala OPD saat pelaksanaan evaluasi oleh Kemenpan-RB dianggap belum terlalu baik, sedangkan dari segi pelaporan sudah sangat baik.

### 3.1.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pencapaian indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari proses kegiatan yang mengolah input menjadi output atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Tabel 3.2  
Perbandingan Capaian Kinerja 2019, 2020, 2021

No	Indikator	Capaian Kinerja		
		2019	2020	2021
1	2	3	4	5
1	Produktivitas sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	85,39 ton/ha	89,64 ton/ha	78,33 ton/ha
	- Produktivitas sub sektor tanaman pangan	46,68	49,70	37,47

No	Indikator	Capaian Kinerja		
		2019	2020	2021
1	2	3	4	5
	- Produktivitas sub sektor tanaman hortikultura	36,43	36,57	36,64
	- Produktivitas sub sektor tanaman perkebunan	2,28	3,37	4,22
2	Persentase pertumbuhan populasi dan produksi ternak	8,28 %	12,36 %	7,68 %
3	Nilai SAKIP		CC	CC

Dibandingkan dengan tahun 2020 dimana capaian kinerja Produktivitas sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan adalah 89,64 ton/ha, sedangkan di tahun 2021 capaian kinerja 78,33 ton/ha yang menunjukkan terjadi penurunan produktivitas sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk produktivitas pada sub sektor tanaman pangan terjadi penurunan pada tahun 2021 (37,47 ton/ha) jika dibandingkan dengan tahun 2020 (49,70), dikarenakan terjadi penurunan baik pada luas tanam dan panen maupun nilai produksi. Hal ini disebabkan cuaca dan iklim yang tidak menentu sehingga prediksi tanam petani menjadi tidak akurat dan minat petani melakukan penanaman pada lahan usaha taninya menjadi rendah, namun karena adanya pengadaan benih padi dan jagung melalui anggaran APBN provinsi dan gencarnya penyuluhan dan pendampingan sehingga petani tetap melakukan penanaman namun terjadi penurunan luas penanaman dan produksi jika dibandingkan tahun 2020 sehingga berimbas pada nilai produktivitas yang tidak terlalu tinggi.

Untuk produktivitas sub sektor perkebunan tahun 2021 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini disebabkan tingginya pemanfaatan pupuk bersubsidi untuk lahan perkebunan petani. Selain itu adanya kegiatan optimasi tanaman jambu mete menyebabkan animo petani meningkat dalam rangka pemeliharaan tanaman perkebunannya, sehingga walaupun nilai produksi menurun dikarenakan iklim yang tidak menentu, sehingga banyak tanaman yang gagal berbuah dan panen, namun nilai produktivitas pada tahun 2021 meningkat (4,22 ton/ha) jika dibandingkan tahun 2020 (3,37 ton/ha).



Untuk produktivitas sub sektor hortikultura mengalami peningkatan pada tahun 2021 (36,64 ton/ha) jika dibandingkan dengan tahun 2020 (36,57 ton/ha), namun nilainya tidak terlalu tinggi atau kurang signifikan.

Dibandingkan dengan tahun 2020 dimana capaian kinerja persentase pertumbuhan populasi dan produksi ternak adalah 12,36%, sedangkan ditahun 2021 capaian kinerja persentase pertumbuhan populasi dan produksi ternak adalah 7,68% yang menunjukkan terjadi penurunan pertumbuhan populasi dan produksi ternak dibandingkan tahun sebelumnya, namun nilai populasi maupun produksi hewan ternak tahun 2021 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2020. Pertumbuhannya populasi dan produksi ternak mengalami penurunan dikarenakan selisih nilai populasi dan produksi hewan ternak tahun 2019-2020 cukup tinggi, sedangkan selisih nilai populasi dan produksi hewan ternak tahun 2020-2021 tidak terlalu tinggi, sehingga nilai pertumbuhan populasi dan produksi mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan pemeliharaan kesehatan hewan ternak sehingga populasi dan produksi ternak tetap mengalami peningkatan walaupun tidak cukup signifikan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu karena tidak adanya program dan kegiatan yang berasal dari APBN dana provinsi seperti pada tahun 2020 yang dapat memacu perkembangan produksi ternak di Kabupaten Buton Tengah.

Dibandingkan dengan tahun 2020 untuk indikator evaluasi SAKIP tahun 2021 tetap yakni nilai evaluasi CC. Walaupun bahan pelaporan sebagai dokumen evaluasi terbilang cukup baik, namun pemaparan hasil kinerja oleh kepala OPD belum terlalu baik, sehingga mempengaruhi nilai evaluasi.

Berdasarkan hasil capaian kinerja mulai pada tahun 2019 sampai dengan 2021, terlihat bahwa untuk indikator Produktivitas sub sektor tanaman pangan dan perkebunan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dikarenakan adanya program khusus dari Kementerian Pertanian melalui perluasan tambah tanam padi dan jagung, serta mendukung misi Bupati Buton Tengah yakni pengembangan potensi pertanian sebagai leading sektor pemicu pengembangan sektor-sektor lainnya melalui kegiatan optimasi jambu mete. Sedangkan untuk indikator Persentase pertumbuhan populasi dan produksi daging ternak dari tahun ketahun mengalami peningkatan capaian kinerja, walaupun pada tahun 2021, nilai pertumbuhan tidak sesuai target yang ditetapkan.

Tabel 3.3  
Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan akhir Tahun Perencanaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2021	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya produktivitas sektor pertanian	Produktivitas sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	101,19 ton/ha	78,33 ton/ha	77,41
2	Meningkatnya stabilitas ternak	Persentase pertumbuhan populasi dan produksi ternak	10,39 %	7,75 %	74,59
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan OPD	Nilai SAKIP B	B (>60-70)	CC (60)	98,36

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa perbandingan di akhir tahun perencanaan bahwa indikator Produktivitas sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan cukup dekat dari target yang telah ditetapkan di akhir tahun perencanaan dengan persentase penyelesaian 77,41%. Untuk indikator Persentase pertumbuhan populasi dan produksi ternak tidak terlalu jauh dari target yang ditentukan di akhir tahun 2022 dengan persentase penyelesaian 74,59%. Sedangkan untuk indikator nilai SAKIP sudah sangat dekat dengan target yang telah ditetapkan di akhir tahun 2022 dengan persentase penyelesaian 98,36%. Oleh karena itu, pada tahun akhir perencanaan nanti diharapkan Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah dapat lebih meningkatkan lagi kinerjanya guna terwujudnya pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan yang lebih baik dan efektif di Kabupaten Buton Tengah.

Tabel 3.4  
 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2021 serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan  
 Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja OPD	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan	Penyebab Kegagalan	Alternatif solusi yang telah dilakukan
Meningkatkan produksi sektor pertanian dan peternakan	Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	Meningkatnya produktivitas sektor pertanian	Produktivitas sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	93,69 ton/ha	78,33 ton/ha	83,61	Optimalnya usaha penyuluhan dan pendampingan serta pengadaan sarana yang menyebabkan meningkatnya kesadaran petani dalam pengelolaan lahan usaha tani	Kondisi iklim yang tidak menentu dan kesadaran petani dalam pemanfaatan pupuk bersubsidi yang masih cukup rendah	Lebih aktif melakukan pendampingan dan penyuluhan serta sekolah lapang mengenai manfaat dan demplot penggunaan pupuk
		Meningkatnya stabilitas ternak	Persentase Pertumbuhan populasi dan produksi ternak	9,85 %	7,75 %	78,68	Optimalnya usaha penyuluhan dan gencarnya kegiatan pemeliharaan kesehatan hewan ternak menumbuhkan kesadaran peternak dalam pengembangan hewan ternaknya	Rendahnya pengadaan sarana pendukung sub sektor peternakan	Selalu meningkatkan monitoring dan evaluasi pada kelompok peternak dalam mengelola ternaknya
		Meningkatnya akuntabilitasi kinerja pelayanan OPD	Nilai SAKIP	B (>60)	CC (60)	98,36			Selalu meningkatkan kualitas utamanya dalam penyusunan laporan perencanaan dan evaluasi

Tabel 3.5  
 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran terhadap Capaian Kinerja Tahun 2021 Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja OPD	Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatkan produksi sektor pertanian dan peternakan	Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	Meningkatnya produktivitas sektor pertanian	Produktivitas sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	93,69 ton/ha	78,33 ton/ha	83,61	4.403.761.995	4.137.976.829	93,96	7,88
		Meningkatnya stabilitas ternak	Persentase Pertumbuhan populasi dan produksi ternak	9,85 %	7,75 %	78,68	128.375.732	99.820.573	77,76	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan OPD	Nilai SAKIP	B (>60)	CC (60)	98,36	3.387.984.654	3.058.112.442	90,26	
<b>Rata-Rata Tingkat Capaian</b>						<b>86,88</b>	<b>7.920.122.381</b>	<b>7.295.909.844</b>	<b>92,12</b>	

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja keseluruhan mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan ditunjukkan pada persentase rata-rata capaian kinerja sebesar 86,88% dengan pemanfaatan anggaran terkait program strategi sebesar 92,12% dari yang telah ditetapkan.

Efisiensi berada pada taraf Baik yaitu sebesar 7,88% dalam hal penggunaan anggaran atau rata-rata 90,12%, namun pada taraf pencapaian kinerja OPD menunjukkan rata-rata capaian 86,88% yang menunjukkan nilai capaian kinerja belum setara dengan realisasi atau penggunaan anggaran yang ada.

Pada indikator nilai evaluasi SAKIP, capaian kinerja 98,36% sedangkan capaian penggunaan anggaran 90,26%. Hal ini menunjukkan nilai capaian kinerja lebih tinggi dari capaian penggunaan anggaran sehingga nilai efisiensi berada pada taraf baik.

Pada indikator persentase pertumbuhan populasi dan produksi ternak, capaian kinerja 78,68% sedangkan capaian penggunaan anggaran 77,76%. Hal ini menunjukkan nilai capaian kinerja lebih tinggi dari capaian penggunaan anggaran sehingga nilai efisiensi berada pada taraf baik.

Pada indikator produktivitas sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, capaian kinerja 83,61% sedangkan capaian penggunaan anggaran 93,96%. Hal ini menunjukkan nilai capaian kinerja lebih rendah dari capaian penggunaan anggaran sehingga nilai efisiensi berada pada taraf cukup. Rendahnya nilai capaian kinerja dikarenakan iklim yang tidak menentu pada tahun laporan yang sangat mempengaruhi nilai produksi dan produktivitas tanaman.

Dengan pencapaian sasaran strategis salah satunya terdapat pada Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian serta Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dimana kegiatan utamanya adalah intensifikasi tanaman padi sawah, optimasi tanaman jambu mete, pembangunan sumber air dan jalan pertanian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan serta program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan salah satu kegiatan utama yaitu pemeliharaan kesehatan hewan ternak, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

### 3.2. Realisasi Anggaran

Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 8.093.172.862,- yang teralokasi untuk Belanja Operasi Rp. 6.178.025.517,- dan Belanja Modal Rp. 1.915.147.345,-.

Dari anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 8.093.172.862,- terealisasi Rp. 7.722.596.741,- atau sebesar 95,42% dengan rincian sebagai berikut :

Untuk lebih jelasnya disajikan melalui tabel sebagai berikut :

Kode	Uraian	Pagu Anggaran			Persentase
		DPA Pergeseran	Realisasi	Selisih	
1	2	4	5	6	7
1	Pendapatan	-	-	-	-
2	Belanja Operasi	6.178.025.517	5.820.313.788	357.711.729	94,21
3	Belanja Modal	1.915.147.345	1.902.282.953	12.864.392	99,33
<b>Total (BTL + BL)</b>		<b>8.093.172.862</b>	<b>7.722.596.741</b>	<b>370.576.121</b>	<b>95,42</b>

Alokasi anggaran belanja langsung tersebut terdiri dari 6 program, 13 kegiatan dan 41 sub kegiatan yang dilaksanakan mulai triwulan I sampai dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2021, dengan rincian sebagai berikut :

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran			Sumber Dana	Ket.
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Urusan Pilihan Pertanian</b>						
<b>a</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.734.271.694</b>	<b>3.413.947.839</b>	<b>91,42</b>	<b>DAU</b>	<b>IKU</b>
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	7.499.200	7.386.200	98,49	DAU	IKU
	- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	1.249.900	1.231.900	98,56	DAU	IKU
	- Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	1.250.000	1.220.000	97,60	DAU	IKU
	- Korodinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1.249.750	1.224.750	98,00	DAU	IKU
	- Koordinasi dan penyusunan dokumen	1.249.800	1.239.800	99,20	DAU	IKU

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran			Sumber Dana	Ket.
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7
	DPA-SKPD					
	- Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1.249.950	1.239.950	99,20	DAU	IKU
	- Evaluasi kinerja perangkat daerah	1.249.800	1.229.800	98,40	DAU	IKU
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.011.366.054	2.726.034.679	90,52	DAU	IKU
	- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.947.825.654	2.667.727.879	90,50	DAU	IKU
	- Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	55.040.850	51.052.250	92,75	DAU	IKU
	- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1.249.800	1.224.800	98,00	DAU	IKU
	- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	7.249.750	6.029.750	83,17	DAU	IKU
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	21.265.200	17.605.200	82,79	DAU	IKU
	- Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	1.748.100	1.718.100	98,28	DAU	IKU
	- Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	19.517.100	15.887.100	81,40	DAU	IKU
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.563.250	7.523.000	99,47	DAU	IKU
	- Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	7.563.250	7.523.000	99,47	DAU	IKU
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	329.366.150	317.168.563	96,30	DAU	IKU
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	2.432.500	2.432.500	100,00	DAU	IKU

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran			Sumber Dana	Ket.
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	9.777.900	8.744.000	89,43	DAU	IKU
	- Penyediaan peralatan rumah tangga	2.030.500	2.030.500	100,00	DAU	IKU
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.971.250	4.971.250	100,00	DAU	IKU
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.880.000	2.870.000	99,65	DAU	IKU
	- Penyediaan bahan/material	10.000.000	0	0,00	DAU	IKU
	- Fasilitasi kunjungan tamu	3.702.000	3.701.500	99,99	DAU	IKU
	- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	293.572.000	292.418.813	99,61	DAU	IKU
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	198.617.250	198.460.824	99,92	DAU	IKU
	- Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	130.967.250	130.938.500	99,98	DAU	IKU
	- Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor lainnya	67.650.000	67.522.324	99,81	DAU	IKU
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.644.590	81.996.823	81,47	DAU	IKU
	- Penyediaan jasa surat menyurat	6.000.000	6.000.000	100,00	DAU	IKU
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	21.545.040	15.283.623	70,94	DAU	IKU
	- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	73.099.550	60.713.200	83,06	DAU	IKU
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.950.000	57.772.550	99,69	DAU	IKU
	- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	51.540.000	51.472.550	99,87	DAU	IKU



Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran			Sumber Dana	Ket.
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7
	jabatan					
	- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	6.410.000	6.300.000	98,28	DAU	IKU
<b>b</b>	<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>	<b>999.587.750</b>	<b>997.573.350</b>	<b>99,80</b>	DAU	IKU
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	999.587.750	997.573.350	99,80	DAU	IKU
	- Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	970.770.000	970.300.000	99,95	DAU	IKU
	- Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	28.817.750	27.273.350	94,64	DAU	IKU
<b>c</b>	<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>2.815.250.095</b>	<b>2.802.272.129</b>	<b>99,54</b>	<b>DAK dan DAU</b>	<b>IKU</b>
1	Pembangunan Prasarana Pertanian	2.815.250.095	2.802.272.129	99,54	DAK dan DAU	IKU
	- Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	453.108.000	453.100.000	100,00	DAK	IKU
	- Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan embung pertanian	127.454.000	127.350.000	99,92	DAK	IKU
	- Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	1.438.158.000	1.428.187.734	99,31	DAK dan DAU	IKU
	- Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya	796.530.095	793.634.395	99,64	DAK	IKU
<b>d</b>	<b>Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>123.447.573</b>	<b>99.820.573</b>	<b>80,86</b>	DAU	IKU
1.	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan	123.447.573	99.820.573	80,86	DAU	IKU

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran			Sumber Dana	Ket.
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7
	Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota					
	- Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	123.447.573	99.820.573	80,86	DAU	IKU
<b>e</b>	<b>Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</b>	<b>73.400.500</b>	<b>70.851.500</b>	<b>96,53</b>	<b>DAU</b>	<b>Non IKU</b>
1.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	73.400.500	70.851.500	96,53	DAU	Non IKU
	- Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	52.131.300	50.388.300	96,66	DAU	Non IKU
	- Pencegahan, penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	21.269.200	20.463.200	96,21	DAU	Non IKU
<b>f</b>	<b>Program Penyuluhan Pertanian</b>	<b>347.215.250</b>	<b>338.131.350</b>	<b>97,38</b>	<b>DAU</b>	<b>Non IKU</b>
1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	347.215.250	338.131.350	97,38	DAU	Non IKU
	- Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	49.307.000	46.985.000	95,29	DAU	Non IKU
	- Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	143.035.000	139.900.000	97,81	DAU	Non IKU
	- Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluh pertanian	7.000.000	6.930.000	99,00	DAU	Non IKU
	- Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota	147.873.250	144.316.350	97,50	DAU	Non IKU
	<b>Jumlah</b>	<b>8.093.172.862</b>	<b>7.722.596.741</b>	<b>95,42</b>		

Berdasarkan tabel di atas dapat kami sajikan bahwa realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

**A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

**1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.249.900 dan realisasi keuangan Rp. 1.231.900 (98,56%). Sub kegiatan ini menghasilkan output dokumen Renja 2022 dan Renja Perubahan 2021.
- Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.250.000 dan realisasi keuangan Rp. 1.220.000 (97,60%). Sub kegiatan ini menghasilkan output 1 dokumen yakni dokumen RKA SKPD.
- Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.249.750 dan realisasi keuangan Rp. 1.224.750 (98,00%). Sub kegiatan ini menghasilkan output dokumen RKA Pergeseran SKPD.
- Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.249.800 dan realisasi keuangan Rp. 1.239.800 (99,20%). Sub kegiatan ini menghasilkan output dokumen DPA SKPD.
- Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.249.950 dan realisasi keuangan Rp. 1.239.950 (99,20%). Sub kegiatan ini menghasilkan output dokumen DPA Pergeseran SKPD.
- Evaluasi kinerja perangkat daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.249.800 dan realisasi keuangan Rp. 1.229.800 (98,40%). Sub kegiatan ini menghasilkan output dokumen SAKIP SKPD.

**2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.011.366.054 dan realisasi keuangan Rp. 2.726.034.679 (90,52%). Sub kegiatan ini menghasilkan output gaji dan tunjangan PNS serta TPP.
- Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 55.040.850 dan realisasi keuangan Rp. 51.052.250 (92,75%). Sub kegiatan ini menghasilkan output insentif bagi pengelola keuangan dan honorarium operator keuangan SKPD.
- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.249.800 dan realisasi keuangan Rp. 1.224.800

(98,00%). Sub kegiatan ini menghasilkan output laporan keuangan akhir tahun.

- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semestaran SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 7.249.750 dan realisasi keuangan Rp. 6.029.750 (83,17%). Sub kegiatan ini menghasilkan output laporan keuangan semester I SKPD dan honorarium petugas administrasi keuangan.

### **3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

- Pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.748.100 dan realisasi keuangan Rp. 1.718.100 (98,28%). Sub kegiatan ini menghasilkan output laporan keluar masuknya BMD SKPD.
- Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 19.517.100 dan realisasi keuangan Rp. 15.887.100 (81,40%). Sub kegiatan ini menghasilkan output laporan BMD berupa KIB A, KIB B, KIB C, KIB D, KIB E dan laporan persediaan serta insetif pengurus barang dan tenaga operator BMD SKPD.

### **4. Adminsitration Kepegawaian Perangkat Daerah**

- Pendataan dan pengolahan adminsitration kepegawaian dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 7.563.250 dan realisasi keuangan Rp. 7.523.000 (99,47%). Sub kegiatan ini menghasilkan output 4 dokumen yakni nominatif pegawai, KGB, kenaikan pangkat, dan data pensiun pegawai serta honorarium tenaga administrasi kepegawaian selama 12 bulan.

### **5. Adminsitration Umum Perangkat Daerah**

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.432.500 dan realisasi keuangan Rp. 2.432.500 (100,00%). Sub kegiatan ini menghasilkan output alat dan komponen listrik.
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 9.777.900 dan realisasi keuangan Rp. 8.744.000 (89,43%). Sub kegiatan ini menghasilkan output peralatan dan perlengkapan kantor.
- Penyediaan peralatan rumah tangga dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.030.500 dan realisasi keuangan Rp.2.030.500 (100,00%). Sub kegiatan ini menghasilkan output alat dan bahan-bahan kebersihan.
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.971.250 dan realisasi keuangan Rp. 4.971.250 (100,00%).

Sub kegiatan ini menghasilkan output dokumen yang dicetak dan digandakan.

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.880.000 dan realisasi keuangan Rp. 2.870.000 (99,65%). Sub kegiatan ini menghasilkan output koran selama 12 bulan.
- Penyediaan bahan/material dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 10.000.000 dan realisasi keuangan Rp. 0 (0,00%) dengan sisa anggaran Rp. 10.000.000,- yang tidak terealisasi dikarenakan kegiatan pameran tidak dilaksanakan sama sekali pada tahun 2021. Kegiatan ini menghasilkan output bahan pameran.
- Fasilitasi kunjungan tamu dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.702.000 dan realisasi keuangan Rp. 3.701.500 (99,99%). Sub kegiatan ini menghasilkan output makanan dan minuman untuk menjamu tamu.
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 293.572.000 dan realisasi keuangan Rp. 292.418.813 (99,61%). Sub kegiatan ini menghasilkan output perjalanan dinas dalam dan luar daerah.

#### **6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- Pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 130.967.250 dan realisasi keuangan Rp. 130.938.500 (99,92%). Sub kegiatan ini menghasilkan output peralatan dan mesin sebanyak 3 unit berupa mesin penggiling padi, laptop dan SSD.
- Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 67.650.000 dan realisasi keuangan Rp. 67.522.324 (99,81%). Sub kegiatan ini menghasilkan output bangunan gudang alat dan mesin pertanian.

#### **7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan jasa surat menyurat dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 6.000.000 dan realisasi keuangan Rp. 6.000.000 (100,00%). Sub kegiatan ini menghasilkan output materai 10ribu.
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 21.545.040 dan realisasi keuangan Rp. 15.283.623 (70,94%) dengan sisa anggaran Rp. 6.261.417 yang tidak terealisasi karena keseluruhan tagihan baik air, listrik maupun indihome sudah terpenuhi

sehingga anggaran tersebut tidak terpakai. Sub kegiatan ini menghasilkan output bukti pembayaran tagihan air, listik dan indihome.

- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 73.009.550 dan realisasi keuangan Rp. 60.713.200 (83,06%). Sub kegiatan ini menghasilkan output ATK dan bahan komputer untuk kebutuhan kantor sehari-hari serta honorarium petugas kebersihan.

#### **8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 51.540.000 dan realisasi keuangan Rp. 51.472.550 (99,87%). Sub kegiatan ini menghasilkan output suku cadang kendaraan dinas roda dua dan roda empat serta bahan bakas kendaraan dinas roda empat dan honorarium supir kepala SKPD.
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 6.410.000 dan realisasi keuangan Rp. 6.300.000 (98,28%). Sub kegiatan ini menghasilkan output peralatan kantor dalam kondisi baik.

### **B. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**

#### **1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**

- Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 970.770.000 dan realisasi keuangan Rp. 970.300.000 (99,95%). Sub kegiatan ini menghasilkan output kegiatan oprimasi tanaman jambu mete dan intensifikasi tanaman padi sawah.
- Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 28.817.750 dan realisasi keuangan Rp. 27.273.350 (94,64%). Sub kegiatan ini menghasilkan output perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka survei lokasi, monitoring dan evaluasi kegiatan bidang tanaman pangan dan hortikultura, bidang perkebunan serta bidang prasarana dan sarana pertanian.

### **C. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**

#### **1. Pembangunan Prasarana Pertanian**

- Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 453.108.000 dan realisasi keuangan Rp.

453.100.000 (100,00%). Sub kegiatan ini menghasilkan output bangunan irigasi air tanah mendukung tanaman pangan dan hortikultura.

- Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan embung pertanian dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 127.454.000 dan realisasi keuangan Rp. 127.350.000 (99,92%). Sub kegiatan ini menghasilkan output bangunan embung mendukung pertanian.
- Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.438.158.000 dan realisasi keuangan Rp. 1.428.187.734 (99,31%). Sub kegiatan ini menghasilkan output jalan usaha tani dan jalan produksi.
- Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 796.530.095 dan realisasi keuangan Rp. 793.634.395 (99,64%). Sub kegiatan ini menghasilkan output bangunan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) kecamatan dalam kondisi baik dan lengkap dengan sarana informasinya.

#### **D. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

##### **1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota**

- Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 123.447.573 dan realisasi keuangan Rp. 99.820.573 (80,86%). Sub kegiatan ini menghasilkan output obat-obatan ternak, perjalanan dinas dalam rangka pemeliharaan kesehatan hewan ternak serta honorarium petugas administrasi, operator SKPD dan dokter hewan.

#### **E. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**

##### **1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**

- Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 52.131.300 dan realisasi keuangan Rp. 50.388.300 (96,66%). Sub kegiatan ini menghasilkan output obat-obatan tanaman, perjalanan dinas dalam rangka pendampingan pengendalian OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta honorarium tenaga operator SKPD.
- Pencegahan, penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 21.269.200 dan realisasi keuangan Rp. 20.463.200 (96,21%). Sub kegiatan

ini menghasilkan output baliho pencegahan kebakaran lahan yang dipasang didaerah rawan kebakaran serta perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi pencegahan dan penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

## **F. Program Penyuluhan Pertanian**

### **1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**

- Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 49.307.000 dan realisasi keuangan Rp. 46.985.000 (95,29%). Sub kegiatan ini menghasilkan output rapat/pertemuan rebug tani dan mimbar sarasehan.
- Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 143.035.000 dan realisasi keuangan Rp. 139.900.000 (97,81%). Sub kegiatan ini menghasilkan output laporan hasil penilaian kelas kemampuan kelompok tani.
- Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluh pertanian dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 7.000.000 dan realisasi keuangan Rp. 6.930.000 (99,00%). Sub kegiatan ini menghasilkan output ATK Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) kecamatan.
- Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 147.873.250 dan realisasi keuangan Rp. 144.316.350 (97,59%). Sub kegiatan ini menghasilkan output sekolah lapang kegiatan intensifikasi tanaman padi sawah dan sekolah lapang kegiatan optimasi tanaman jambu mete.



## **BAB IV PENUTUP**

Tujuan penyusunan LKjIP adalah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugas berdasarkan tujuan, sasaran, kebijakan, Strategi, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah untuk dapat diketahui dan dinilai apakah akuntabel atau tidak.

Secara keseluruhan hasil capaian Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah tahun 2021 masih sangat jauh dari sasaran yang telah ditargetkan. Beberapa Sasaran tersebut dapat dihitung rata-rata persentase capaian realisasi indikator kegiatan dari 3 (tiga) sasaran pada tahun 2021 yaitu sebesar 86,88% dengan kategori “Berhasil”.

Sedangkan jika dilihat dari akuntabilitas keuangan dari pagu anggaran sebesar Rp. 8.093.172.862,- dan terealisasi Rp. 7.722.596.741,- atau sebesar 95,42% dengan kategori “Sangat Berhasil”.

Ketiga sasaran strategis yang ingin dicapai antara lain :

1. Meningkatnya produktivitas sektor pertanian
2. Meningkatnya Stabilitas ternak
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan OPD

Kategori “Berhasil” dalam pencapaian pelaksanaan kegiatan tersebut tidak lepas dari hal-hal penunjang/faktor pendorong, penghambat/ kendala, namun demikian beberapa kendala yang muncul telah dapat diidentifikasi dan dicarikan solusi pemecahannya sehingga di dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik walaupun belum maksimal.

Demikian laporan kinerja instansi pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah tahun 2021, semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan sasaran dan kegiatan di tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua.